



PUTUSAN
Nomor 209/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-650/PJ./2016, tanggal 22 Februari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER, beralamat di Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 12, Suite TA-1205, Jalan Jend. Gatot Subroto, Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Hiroyuki Moriyasu, jabatan Wakil Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 65875 /PP/MXB/13/2015, tanggal 18 November 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp963.289.533,00 tersebut dibatalkan menjadi NIHIL;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 209/B/PK/Pjk/2018



bahwa adapun perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Masa Pajak April 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	2.640.103.902,00
2.	PPh Pasal 26 yang terutang	264.010.390,00
3.	Kredit Pajak :	
	- Setoran Masa	264.010.390,00
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00
5.	Sanksi Administrasi:	0,00
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban tanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 65875/PP/MXB/13/2015, tanggal 18 November 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-925/WPJ.19/2014 tanggal 12 Mei 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2010 Nomor 00002/204/10/092/13 tanggal 7 Maret 2013, atas nama PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, NPWP 01.357.596.4-092.000, beralamat di Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 12 Suite TA-1205, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan PPh Pasal 26, menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp2.640.103.902,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	<u>Rp 264.010.390,00</u>
Kredit Pajak:	
- Setoran Masa	<u>Rp 264.010.390,00</u>
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	<u>Rp 264.010.390,00</u>



Jumlah Pajak yang tidak / kurang bayar Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Maret 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65875/PP/M.XB/13/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65875/PP/M.XB /13/2015 tanggal 18 Nopember 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-925/WPJ.19/2014 tanggal 12 Mei 2014, tentang keberatan



atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2010 Nomor 00002/204/10/092/13 tanggal 7 Maret 2013, atas Nama PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, NPWP 01.357.596.4-092.000, beralamat di Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 12 Suite TA-1205, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Mei 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-925/WPJ.19/2014 tanggal 12 Mei 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2010 Nomor 00002/204/10/092/13 tanggal 7 Maret 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.357.596.4-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2010 sebesar Rp963.289.533,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan



menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori* maka pembayaran atas jasa-jasa yang diberikan berupa *Technical Committee, Insurance Co-ordinator, Intercreditor Agent, Facility Agent, Security Agent, Trustte and Account Banks* telah dipenuhi persyaratan di antaranya bahwa *certificate of domicile (CoD)* dari *Nordea Bank Finlandia Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Finland Plc (Singapore Branch)* yang diterbitkan *Competent Authority* yang sah dari negara *treaty partner* kepada Pemberi Jasa yang menjadikan landasan pijak hukum atas penilaian dan pengujian pada substansi hukum dalam perkara *a quo* yang telah memiliki validitas hukum karena yurisdiksi atas hak pemajakannya berada pada negara *partner*, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 26 dan Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia – Finlandia, Jepang, Swedia dan Singapura) *juncto* Article 27 Vienna Convention;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 209/B/PK/Pjk/2018



huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp2.640.103.902,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	<u>Rp 264.010.390,00</u>
Kredit Pajak:	
- Setoran Masa	<u>Rp 264.010.390,00</u>
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	<u>Rp 264.010.390,00</u>
Jumlah Pajak yang tidak / kurang bayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 209/B/PK/Pjk/2018

